

**DINAMIKA KOLABORASI DALAM PROGRAM DAPUR SEHAT ATASI
STUNTING (DASHAT) UNTUK MENURUNKAN PREVALENSI STUNTING DI
KECAMATAN PETANAHAN, KABUPATEN KEBUMEN**

Anin Nur Farikha, Retno Sunu Astuti

Departemen Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro
Jl. dr. Antonius Suroyo, Universitas Diponegoro, Kampus Tembalang, Kota Semarang,
Jawa Tengah, Indonesia. Kode Pos 50275
Telepon (024) 7465407 Faksimile (024) 7465405
Laman: <http://fisip.undip.ac.id> Email: fisip@undip.ac.id

ABSTRACT

Stunting is one of the nutrition problems faced by countries around the world, especially in poor and developing countries, including Indonesia. Petanahan Sub-district is one of the sub-districts that has succeeded in reducing the stunting prevalence rate below the Kebumen District average through various efforts, one of which is the DASHAT Program. This study aims to analyze the collaboration dynamics of the DASHAT Program in Petanahan Sub-district and the driving factors in the collaboration. The theory used is the Collaboration Dynamics theory by Emerson, Nabatchi and Balogh (2012) in which there are shared principles, shared motivation, and the capacity to take joint action. The method used is descriptive qualitative. The results showed that in the collaboration of the DASHAT program there is a movement of shared principles formed through online and offline discussion forums, as well as the absence of individual interests owned by the actors. Shared motivation is formed through trust and mutual understanding of differences, as well as recognition that the actors are credible in carrying out their duties. The capacity for collective action is formed through the existence of BKKBN Regulation Number 12 of 2021 and the DASHAT program implementation guidebook, collective leadership through the family planning extension field coordinator who acts as a facilitator and mediator, and the actors have sufficient knowledge about stunting. The driving factors of the collaboration dynamics of the DASHAT Program are equal participation of actors, no dependence on procedures, no hierarchical application of the institutions involved, accountability, skilled human resources, agreement on the reasons and objectives of collaboration, and community awareness to participate. This research provides recommendations for involving the private sector to maximize funding, collaboration with educational institutions, and strengthening policies governing the DASHAT program.

Keywords: *Stunting, Collaboration, DASHAT Program, Actors, Nutrition*

ABSTRAK

Stunting menjadi salah satu permasalahan gizi yang dihadapi oleh negara di seluruh dunia, khususnya di negara-negara miskin dan berkembang, termasuk Indonesia. Kecamatan Petanahan menjadi salah satu kecamatan yang berhasil menekan angka prevalensi stunting di bawah rata-rata Kabupaten Kebumen melalui berbagai upaya, salah satunya Program DASHAT. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika kolaborasi dalam Program DASHAT di Kecamatan Petanahan dan faktor pendorong dalam kolaborasi tersebut. Teori yang digunakan yaitu teori Dinamika Kolaborasi oleh Emerson, Nabatchi dan Balogh (2012) yang di dalamnya terdapat penggerakan prinsip bersama, motivasi bersama, dan kapasitas melakukan tindakan bersama. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam kolaborasi program DASHAT terdapat penggerakan prinsip bersama yang dibentuk melalui forum diskusi secara *online* maupun *offline*, serta tidak adanya kepentingan individu yang dimiliki oleh para aktor. Motivasi bersama dibentuk melalui adanya kepercayaan dan saling memahami perbedaan, serta adanya pengakuan bahwa para aktor kredibel dalam menjalankan tugasnya. Kapasitas melakukan tindakan bersama terbentuk melalui adanya Peraturan BKKBN Nomor 12 Tahun 2021 serta buku panduan pelaksanaan program DASHAT, kepemimpinan kolektif melalui koordinator lapangan penyuluh KB yang berperan sebagai fasilitator dan mediator, dan para aktor memiliki pengetahuan yang cukup mengenai stunting. Faktor pendorong dinamika kolaborasi dalam Program DASHAT yaitu partisipasi aktor yang merata, tidak ketergantungan pada prosedur, tidak ada penerapan hierarkis terhadap institusi yang terlibat, adanya akuntabilitas, SDM yang terampil, adanya kesepakatan alasan dan tujuan kolaborasi, serta adanya kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi. Penelitian ini memberikan rekomendasi untuk melibatkan sektor privat untuk memaksimalkan pendanaan, kolaborasi dengan Lembaga Pendidikan, dan penguatan kebijakan yang mengatur program DASHAT.

Kata Kunci : Stunting, Kolaborasi, Program DASHAT, Aktor, Gizi

Pendahuluan

World Health Organization (WHO) mendefinisikan stunting sebagai suatu gangguan perkembangan yang dialami oleh anak-anak. Penyebab utama dari kondisi ini meliputi malnutrisi yang berkepanjangan, infeksi yang terjadi secara berulang, serta kurangnya stimulasi psikososial yang memadai. Stunting tidak hanya berdampak pada pertumbuhan fisik, tetapi juga mempengaruhi perkembangan kognitif anak (Wagino, 2022). Dampak jangka panjang dari stunting dapat mengakibatkan penurunan kemampuan kognitif dan prestasi akademik, serta melemahnya sistem kekebalan tubuh dan kapasitas kerja. Selain itu, stunting juga berisiko meningkatkan kemungkinan terjadinya berbagai penyakit, termasuk penyakit jantung dan pembuluh darah, diabetes, kanker, serta disabilitas pada usia lanjut. (Prendergast & Humphrey, 2014).

Penyebab stunting melibatkan berbagai faktor, baik yang bersifat internal maupun eksternal. Ketahanan pangan keluarga dan tingkat pendidikan ibu juga berpengaruh terhadap kemampuan mereka dalam menyediakan gizi yang baik. Tak kalah penting, riwayat penyakit infeksi pada balita serta aspek sosial budaya di lingkungan mereka turut memengaruhi kejadian stunting (Anwar, et al., 2022).

Stunting menjadi salah satu target *Sustainable Development Goals* (SDGs) yang termasuk pada tujuan pembangunan berkelanjutan ke-2 yaitu Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan.

Indonesia merupakan salah satu negara yang menghadapi tingkat prevalensi stunting yang cukup tinggi jika dibandingkan dengan negara-negara berpendapatan menengah lainnya. Anak-anak yang terlahir dalam keadaan sehat dan tumbuh dengan baik, serta mendapatkan dukungan pendidikan yang berkualitas, memiliki potensi untuk menjadi generasi penerus yang mampu memberikan kontribusi signifikan terhadap pembangunan bangsa dan negara. Sementara anak yang bergejala stunting diprediksi meraih pendapatan 20% lebih rendah di usia kerja yang dapat mengakibatkan parahnya angka kemiskinan serta mengancam kelangsungan hidup generasi yang akan datang (Nisa, 2018).

Hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) pada tahun 2021 menunjukkan penurunan prevalensi sebesar 3,3% menjadi 24,4%, dan pada tahun 2022, angka tersebut turun lagi menjadi 21,6%. (BRIN, 2023).

Tahun	Persentase (%)
2019	27,7
2021	24,4
2022	21,6
2023	21,5

Sumber : SSGBI 2019, SSGI 2022, SKI 2023

Dari tabel di atas, menunjukkan bahwa prevalensi stunting di Indonesia terus menurun dari tahun ke tahun. Namun, angka stunting masih tergolong tinggi dan jauh dari target nasional yaitu sebesar 14%. Pada 2023 kasus stunting berada pada angka 21,5%, dengan angka Provinsi Jawa Tengah Provinsi Jawa Tengah berada pada urutan ke 25 secara nasional dengan prevalensi 20,7 %, dimana angka tersebut masih jauh dari target nasional sebesar 14%.

Jika merujuk pada pedoman WHO dengan ambang batas prevalensi stunting pada 20%, Jawa Tengah pun belum mencapai target yang ditetapkan. Pemerintah Jawa Tengah bertekad untuk mengurangi angka stunting hingga minimal 14%, sesuai dengan target yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.

Ditinjau dari protokol WHO mengenai ambang batas prevalensi stunting sebesar 20%, maka terdapat 20 kabupaten/kota di Jawa Tengah yang memiliki prevalensi di atas ambang batas dengan kategori prevalensi stunting sedang,

salah satunya yaitu Kabupaten Kebumen. Dilihat dari rata-rata prevalensi stunting Provinsi Jawa Tengah (20,7%), Kabupaten Kebumen masih tertinggal, yaitu sebesar 21,9%.

Data per kecamatan di Kabupaten Kebumen tahun 2021-2024 menunjukkan tren yang naik turun (fluktuatif). Prevalensi stunting di Kabupaten Kebumen kebanyakan berada pada titik tertinggi pada tahun 2021. Pada data terbaru yaitu tahun 2023, prevalensi stunting sudah membaik dengan angka di bawah 10%. Meskipun demikian, pemerintah harus menciptakan konsistensi dalam penekanan angka stunting di Kabupaten Kebumen.

Meninjau lokus penelitian di Kecamatan Petanahan, data menunjukkan bahwa Kecamatan Petanahan dapat menekan angka prevalensi stunting cukup tinggi yaitu tahun 2021 sebesar 14,17% dan pada tahun 2023 dapat mencapai angka 9,8%, dimana angka tersebut di bawah rata-rata stunting di Kabupaten Kebumen (9,87%). Hal tersebut menunjukkan bahwa terdapat keberhasilan dari program-program upaya penurunan prevalensi stunting yang dilaksanakan di Kecamatan Petanahan, Kabupaten Kebumen.

Salah satu langkah intervensi untuk mengatasi stunting adalah dengan memberikan makanan bergizi seimbang kepada keluarga yang berisiko mengalami stunting. Hal ini dilakukan melalui

pemanfaatan bahan pangan lokal yang dioptimalkan, serta melibatkan kontribusi dari mitra lain dalam program Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT). Dengan pendekatan ini, diharapkan dapat meningkatkan asupan gizi dan mengurangi risiko stunting di masyarakat.

Program DASHAT dilaksanakan oleh pemerintah desa atau kelurahan. Dalam pelaksanaannya, mereka mengembangkan kelompok atau lembaga lokal yang relevan. Pengembangan ini disesuaikan dengan potensi dan kebutuhan dalam penanganan stunting di tingkat desa dan sekitarnya. Penelitian terfokus pada salah satu desa di Kecamatan Petanahan yaitu Desa Ampelsari. Desa Ampelsari menjadi *pilot project* dari pelaksanaan Program DASHAT karena masuk dalam nominasi Kampung KB terbaik di Kabupaten Kebumen.

Berdasarkan pemaparan di atas, maka pertanyaan penelitian yang akan dijawab dalam penelitian ini adalah “Bagaimana Dinamika Kolaborasi dalam Program Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) untuk Menurunkan Prevalensi Stunting di Kecamatan Petanahan, Kabupaten Kebumen”.

Dalam penelitian ini memiliki perbedaan dengan kajian penelitian yang sebelumnya, dimana terfokus pada dinamika kolaborasi dalam Program DASHAT di Desa Ampelsari, Kecamatan

Petanahan, Kabupaten Kebumen. Penggunaan teori yang dipakai pun berbeda dengan penelitian terdahulu, yaitu menggunakan teori Dinamika Kolaborasi oleh Emerson, Nabatchi dan Balogh (2012) yang di dalamnya terdapat penggerakan prinsip bersama, motivasi bersama, dan kapasitas melakukan tindakan bersama.

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis yaitu penelitian deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk menganalisis dan mengkaji secara menyeluruh fenomena-fenomena sosial tertentu yang berkaitan dengan dinamika kolaborasi pada Program DASHAT di Desa Ampelsari, Kecamatan Petanahan. Lokus penelitian yaitu di Desa Ampelsari, Kecamatan Petanahan, Kabupaten Kebumen. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara mendalam kepada narasumber terkait, observasi dan dokumentasi. Subjek penelitian ditentukan dengan metode purposive sampling melalui Dinkes PPKB Kabupaten Kebumen dan PLKB Kecamatan Petanahan, lalu disempurnakan dengan teknik *snowball sampling* untuk menentukan informan lainnya. Analisis data dilakukan dengan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil dan Pembahasan

Penelitian ini pada dasarnya melakukan analisis mengenai dinamika kolaborasi yang terjadi dalam Program DASHAT di Desa Ampelsari, Kecamatan Petanahan, Kabupaten Kebumen dan faktor pendorong dari kolaborasi tersebut.

Dinamika Kolaborasi dalam Program DASHAT di Desa Ampelsari

Dinamika kolaborasi Program DASHAT dilihat melalui beberapa fenomena yaitu penggerakan prinsip bersama, motivasi bersama, dan kapasitas melakukan tindakan bersama.

1. Penggerakan Prinsip Bersama

a. Pengungkapan

Pengungkapan didefinisikan sebagai proses di mana kepentingan kolektif dan kepentingan individu dari setiap aktor dalam kolaborasi diungkapkan. Dalam penggerakan prinsip bersama, terdapat penjelasan mengenai kepentingan masing-masing aktor dalam kolaborasi program DASHAT. Setiap aktor mengungkapkan kepentingan yang relevan dengan peran mereka dalam program tersebut. Partisipasi mereka tidak didorong oleh kepentingan pribadi, melainkan oleh tuntutan tugas dan tanggung jawab yang harus mereka jalankan sesuai dengan bidang masing-masing. Hal ini menunjukkan bahwa setiap individu

memiliki peran yang signifikan dalam kolaborasi ini. Keterlibatan mereka mencerminkan komitmen untuk mencapai tujuan bersama. Dengan demikian, kolaborasi ini lebih berfokus pada pencapaian hasil yang bermanfaat bagi masyarakat. Keterlibatan para aktor dalam program DASHAT menunjukkan sinergi yang kuat dalam upaya penanganan stunting.

b. Deliberasi

Deliberasi terbentuk dengan adanya diskusi bersama, terdapat ruang untuk mengemukakan pendapat oleh semua stakeholders. Pada awal terentuknya kolaborasi ini, terdapat pertemuan untuk mengenalkan program DASHAT yang dihadiri juga oleh BKKBN Provinsi Jawa Tengah.



Sumber : PLKB Kecamatan Petanahan

Selanjutnya untuk lebih teknisnya, pertemuan atau forum diskusi banyak dilakukan oleh eksekutor, yaitu PLKB, Pemerintah Desa Ampelsari, dan para kader DASHAT. Forum diskusi dibuka

secara offline dan online melalui Whatsapp grup untuk mempermudah koordinasi. Dalam pelaksanaan diskusi, semua aktor terbuka untuk mengemukakan pendapatnya masing-masing dengan damai. Sehingga forum diskusi berjalan dengan lancar dan kekeluargaan.

c. Determinasi

Determinasi diartikan sebagai serangkaian tindakan keputusan terhadap tujuan kolaborasi yang diputuskan secara bersama-sama. Proses pengambilan keputusan dalam kolaborasi dilakukan melalui musyawarah yang melibatkan semua aktor yang terlibat. Hal ini menunjukkan bahwa setiap suara dan pendapat dari para aktor diperhitungkan dalam proses tersebut. Dengan adanya musyawarah, determinasi dalam kolaborasi ini dapat dikatakan telah terpenuhi. Proses ini memastikan bahwa keputusan yang diambil mencerminkan kesepakatan bersama. Selain itu, musyawarah juga menciptakan rasa memiliki di antara para aktor terhadap keputusan yang diambil. Keterlibatan semua pihak dalam pengambilan keputusan memperkuat komitmen mereka

terhadap kolaborasi. Dengan demikian, kolaborasi ini tidak hanya efektif, tetapi juga inklusif dalam melibatkan semua aktor.

2. Motivasi Bersama

a. Kepercayaan Bersama

Kepercayaan Bersama berarti memiliki sikap saling percaya antar aktor yang terlibat dalam kolaborasi. Dalam kolaborasi program DASHAT, kepercayaan ini terjalin berkat adanya komunikasi yang baik antara semua aktor yang terlibat. Selain itu, transparansi dalam pengelolaan anggaran juga berkontribusi pada terciptanya kepercayaan tersebut. Para aktor yang terlibat dalam program ini memiliki kompetensi yang memadai untuk melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan bidang masing-masing. Hal ini memastikan bahwa setiap individu dapat berkontribusi secara efektif dalam kolaborasi. Dengan adanya kepercayaan, komunikasi, dan kompetensi, kolaborasi ini menjadi lebih solid dan produktif.

b. Pemahaman Bersama

Pemahaman Bersama berarti adanya sikap saling mengerti dan menghargai perbedaan yang ada. Pemahaman Bersama dibentuk melalui adanya kepercayaan yang

telah terbentuk di dalam kolaborasi. Pelaksanaan kolaborasi Program DASHAT di Desa Ampelsari, Kecamatan Petanahan, mempunyai pemahaman bersama di antara semua aktor yang terlibat. Setiap aktor saling memahami dan menghargai perbedaan yang ada di antara mereka. Perbedaan tersebut diterima dengan baik oleh semua pihak, yang menunjukkan sikap terbuka dan toleransi. Selain itu, masalah yang muncul dapat diselesaikan secara damai tanpa menimbulkan konflik yang berkepanjangan. Hal ini mencerminkan bahwa kolaborasi berjalan dengan baik dan harmonis. Dengan adanya pemahaman bersama, para aktor dapat bekerja sama secara efektif untuk mencapai tujuan program.

c. Legitimasi Internal

Legitimasi internal artinya terdapat pengakuan dari internal bahwa aktor-aktor kolaborasi dapat dipercaya atau kredibel dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, serta adanya kolaborasi yang berjalan secara transparan dan adanya pengawasan. Pelaksanaan kolaborasi Program DASHAT di Desa Ampelsari, Kecamatan Petanahan sudah memenuhi aspek

legitimasi internal, dimana para aktor yang terlibat memiliki pengakuan bahwa mereka kredibel dalam menjalankan tugas dan perannya. Aspek transparansi juga dipenuhi melalui adanya Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) dari Balai Penyuluh KB kepada pemerintah kecamatan dan kabupaten. Sementara pengawasan dilakukan langsung oleh Koorlap KB di lapangan saat pelaksanaan kegiatan yang berfungsi untuk memastikan bahwa semua proses berjalan sesuai dengan standar yang telah ditentukan.

3. Kapasitas Melakukan Tindakan Bersama

a. Prosedur dan Kesepakatan Bersama

Prosedur dan kesepakatan bersama berarti aturan-aturan umum, prosedur kegiatan, serta aturan dalam mengambil keputusan yang dilaksanakan melalui kesepakatan bersama dalam wadah formal dan informal.

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa tata pelaksanaan kolaborasi DASHAT tidak ada landasan hukum yang spesifik membahas mengenai

DASHAT. Namun dalam Peraturan BKKBN Nomor 12 Tahun 2021 disebutkan bahwa percepatan penurunan stunting dilaksanakan secara konvergen, holistik, integratif, dan berkualitas melalui kerja sama multisektor di pusat, daerah, dan desa. Terkait teknisnya, BKKBN mengeluarkan buku panduan atau pedoman pelaksanaan yang dapat menjadi acuan dalam pelaksanaan program DASHAT. Dengan demikian, meskipun tidak ada landasan hukum yang spesifik untuk Program DASHAT, keberadaan Peraturan BKKBN dan buku panduan pelaksanaan memberikan kerangka kerja yang jelas bagi semua pihak yang terlibat

b. Kepemimpinan

Kepemimpinan dalam kolaborasi program DASHAT di Desa Ampelsari, Kecamatan Petanahan memiliki kepemimpinan kolektif, tidak ada atasan dan bawahan, semua bekerja sama sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Namun, ada koordinator dari program ini yaitu dipegang oleh Balai Penyuluh KB karena program DASHAT merupakan program dari BKKBN.

Kepemimpinan dari Koordinator Lapangan KB

Kecamatan Petanahan yaitu Ibu Indah Retnowati sebagai ketua tim memiliki sikap tanggung jawab dalam pelaksanaan kolaborasi program DASHAT. Hal ini dapat dilihat dari adanya inisiatif dari pemimpin untuk terus memantau keberjalanan program dengan rutin turun langsung ke lapangan. Ketua tim juga menjalankan perannya sebagai mediator. Ketika terjadi sebuah perselisihan atau perbedaan pendapat dalam forum, pemimpin dapat menjadi penengah dan menghadirkan solusi berupa saran tentang kendala atau permasalahan yang dihadapi. Pemimpin juga seringkali mengagendakan pertemuan rutin baik secara langsung maupun komunikasi melalui WhatsApp grup untuk membahas keberjalanan program agar menjadi evaluasi atas kendala yang sudah atau sedang dijalani.

c. Pengetahuan

Pengetahuan dalam kolaborasi yaitu segala informasi yang dibutuhkan oleh stakeholder untuk berpartisipasi dalam proses kolaborasi. dalam kolaborasi program DASHAT, para aktor yang terlibat telah memiliki pemahaman yang baik tentang masalah stunting dan program DASHAT.

Pengetahuan yang memadai ini diharapkan dapat meningkatkan kinerja mereka dalam mencapai tujuan bersama. Dengan pemahaman yang mendalam, para aktor dapat berkontribusi secara efektif dalam upaya penanganan stunting. Hal ini juga memungkinkan mereka untuk mengambil keputusan yang lebih tepat dan strategis. Selain itu, pengetahuan yang baik akan membantu dalam mengidentifikasi solusi yang relevan untuk masalah yang dihadapi. Dengan demikian, kolaborasi ini dapat berjalan lebih lancar dan produktif. Oleh karena itu, penting bagi semua aktor untuk terus meningkatkan pengetahuan mereka agar dapat berperan secara optimal dalam program ini.

d. Sumber Daya

Sumber daya disini terkait dengan pendanaan secara materi. Sumber daya materi atau anggaran menjadi suatu hal yang penting dalam setiap pelaksanaan suatu kolaborasi program pemerintah. Dalam kolaborasi program DASHAT di Desa Ampelsari, Kecamatan Petanahan sumber daya materi atau anggaran didapatkan dari BKKBN Jawa Tengah dengan jumlah 20 juta untuk 30 hari

pelaksanaan program. Jumlah tersebut dianggap cukup untuk menjalankan berbagai kegiatan yang telah direncanakan dalam program ini, meskipun untuk keberlanjutan program masih kurang untuk kedepannya.

Dalam kolaborasi ini belum terdapat *support* anggaran dari pihak swasta atau yang lainnya. Sehingga diharapkan selanjutnya dapat menggandeng pihak swasta agar anggaran yang didapat lebih maksimal. Kerjasama ini tidak hanya akan memberikan tambahan sumber daya materi, tetapi juga dapat membuka peluang untuk inovasi dan peningkatan kualitas program.

Faktor Pendorong Dinamika Kolaborasi Program DASHAT di Desa Ampelsari

1. Faktor Budaya

a. Partisipasi Kelompok Kepentingan
Partisipasi kelompok kepentingan di program DASHAT Desa Ampelsari, Kecamatan Petanahan sudah dapat dikatakan baik, dalam artian seluruh aktor yang terlibat kolaborasi dapat menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab. Para pelaksana kegiatan maupun masyarakat sudah berpartisipasi

secara aktif dalam kolaborasi ini, termasuk masyarakat sasaran atau penerimanya. Dalam pelaksanaannya program terdapat aktor yang lebih menonjol karena memang sudah menjadi tuntutan perannya, akan tetapi tidak ada istilah dominasi peran yang dilihatkan oleh para aktor. Hal ini menjadi salah satu faktor pendorong kolaborasi karena dengan partisipasi kelompok kepentingan yang merata maka akan menciptakan lingkungan kolaborasi yang suportif, adil, efektif dan efisien karena elemen-elemen pelaksanaan kegiatan sudah diampuh oleh aktor yang sudah mumpuni di bidangnya.

b. Budaya Ketergantungan Pada Prosedur

Kolaborasi dalam Program DASHAT di Desa Ampelsari, Kecamatan Petanahan, memiliki sifat fleksibel dalam menempatkan prosedur dan kondisi lapangan yang ada. Kolaborasi ini berpedoman pada prosedur yang telah ditetapkan, namun tetap memberikan ruang bagi para aktor untuk menyesuaikan diri dengan kondisi lapangan yang mungkin berubah. Fleksibilitas dalam

menjalankan suatu kegiatan menjadi faktor pendorong yang signifikan bagi keberhasilan kolaborasi ini. Dengan adanya kemampuan untuk menyesuaikan langkah-langkah yang diambil sesuai dengan kondisi yang dihadapi, program dapat dilaksanakan dengan lebih efektif dan efisien. Dengan demikian, kombinasi antara kepatuhan terhadap prosedur dan fleksibilitas dalam pelaksanaan kegiatan menciptakan suatu lingkungan kolaborasi yang produktif.

2. Faktor Institusi

a. Penerapan Struktur Hierarkis terhadap Institusi yang Terlibat

Dalam kolaborasi Program DASHAT di Desa Ampelsari, Kecamatan Petanahan, setiap aktor sudah memahami dengan jelas posisi dan tugasnya masing-masing dengan dikoordinir oleh koordinator lapangan (koorlap) KB. Dengan pemahaman yang baik mengenai peran masing-masing, setiap individu dapat berkontribusi secara optimal tanpa merasa tertekan oleh hierarki yang kaku, sehingga menciptakan suasana kerja yang lebih harmonis.

Setiap aktor dalam kolaborasi Program DASHAT memiliki posisi yang setara, yang memungkinkan mereka untuk bekerja sama secara efektif dan saling mendukung. Ketiadaan hierarki yang ketat ini tidak hanya meningkatkan rasa saling percaya di antara para aktor, tetapi juga mendorong mereka untuk berinovasi dan berbagi ide-ide yang konstruktif. Oleh karena itu, keberhasilan program ini tidak hanya ditentukan oleh prosedur yang ada, tetapi juga oleh budaya kerja yang mendukung kolaborasi dan partisipasi aktif dari semua pihak.

b. Akuntabilitas Institusi Publik

Dalam kolaborasi program DASHAT di Desa Ampelsari Kecamatan Petanahan, akuntabilitas ini diwujudkan melalui adanya laporan pertanggungjawaban yang secara rutin diserahkan kepada pihak BKKBN Provinsi dan Dinas Kesehatan PPKB Kabupaten Kebumen. Dengan adanya laporan tersebut, semua pihak yang terlibat dapat memastikan bahwa setiap langkah yang diambil dalam program ini sesuai dengan rencana dan tujuan yang telah ditetapkan.

Selain itu, masyarakat juga diberikan kesempatan untuk ikut memantau pelaksanaan program melalui berbagai saluran informasi, seperti *channel YouTube* Desa Ampelsari dan website resmi Desa Ampelsari.

Hal ini menjadi salah satu faktor pendorong yang signifikan, karena dengan akuntabilitas yang kuat, akan menumbuhkan kepercayaan dari masyarakat. Keberadaan mekanisme akuntabilitas ini juga mendorong semua aktor untuk bekerja dengan lebih baik, karena mereka tahu bahwa setiap tindakan dan keputusan yang diambil akan dipertanggungjawabkan.

3. Faktor Sumber Daya

a. Tenaga Terampil yang Disatukan

Sumber daya manusia yang tergabung dalam kolaborasi Program DASHAT di Desa Ampelsari, Kecamatan Petanahan sudah memiliki keterampilan yang baik di bidangnya masing-masing. Keterampilan yang memadai dari setiap aktor juga sangat mendukung pencapaian tujuan bersama dalam kolaborasi ini. Ketika setiap anggota tim dapat menjalankan perannya dengan baik, maka sinergi

yang terbentuk akan semakin kuat dan produktif. Oleh karena itu, keahlian yang dimiliki oleh sumber daya manusia menjadi faktor penting dalam keberhasilan kolaborasi ini. Secara keseluruhan, kualitas sumber daya manusia yang terlibat dalam kolaborasi ini menjadi salah satu kunci utama dalam mencapai hasil yang diinginkan dan memastikan keberlanjutan program di masa depan.

4. Faktor Lingkungan

a. Latar Belakang Adanya Kolaborasi

Dalam kolaborasi program DASHAT di Desa Ampelsari, Kecamatan Petanahan, terdapat alasan dan tujuan yang telah disepakati oleh semua pihak di awal jalannya kolaborasi. Alasan utama terbentuknya kolaborasi ini adalah meningkatnya kasus stunting yang memerlukan penanganan yang tepat dan terkoordinasi.

Sedangkan tujuan dari kolaborasi ini adalah untuk menurunkan angka stunting melalui pemberian edukasi mengenai menu sehat yang berbasis pada bahan pangan lokal. Dengan memberikan pengetahuan yang tepat kepada masyarakat tentang pentingnya gizi

seimbang dan pemanfaatan sumber daya pangan yang ada di sekitar mereka, diharapkan masyarakat dapat mengubah pola makan dan meningkatkan kesehatan keluarga mereka.

b. Kesadaran Masyarakat

Masyarakat di Desa Ampelsari sudah menunjukkan kesadaran yang tinggi untuk berpartisipasi dalam program yang diadakan. Mereka secara aktif mengikuti pertemuan yang diadakan dan menyambut baik kehadiran para kader yang memberikan edukasi tentang menu sehat secara langsung. Namun, meskipun antusiasme ini terlihat, masih ada beberapa pola hidup masyarakat yang belum berubah, terutama dalam hal menjaga pola makan yang bergizi dan seimbang. Meskipun mereka menyadari pentingnya pola makan sehat dan manfaatnya bagi kesehatan, faktor ekonomi sering kali menjadi penghalang utama dalam menerapkan pola makan yang lebih baik. Oleh sebab itu, diperlukan usaha lebih lanjut untuk membantu masyarakat mengatasi masalah ini, seperti memberikan akses yang lebih baik terhadap bahan pangan bergizi dengan harga terjangkau.

- pendanaan dalam pelaksanaan program DASHAT.
2. Terkait dengan kurangnya jumlah tenaga ahli gizi di puskesmas, diperlukan adanya kolaborasi dengan Lembaga Pendidikan untuk turut serta berpartisipasi melalui pengadaan program magang untuk mahasiswa gizi di daerah kecamatan.
 3. Perlu adanya penguatan kebijakan atau kesepakatan bersama yang secara khusus mengatur kolaborasi program DASHAT di Kabupaten Kebumen, sehingga terdapat konsekuensi yang jelas ketika salah satu aktor tidak menjalankan perannya selama kolaborasi berlangsung.

Daftar Pustaka

- Andika, F. & Rahmi, N., 2022. Edukasi Kesehatan tentang Status Gizi dalam Menurunkan Angka Kejadian STunting di MAN 5 Aceh Besar. *Jurnal Pengabdian Masyarakat (Kesehatan)*, pp. 100-105.
- Anwar, S., Winarti, E. & Sunardi, 2022. Systematic Review Faktor Risiko, Penyebab dan Dampak Stunting pada Anak. *Jurnal Ilmu Kesehatan*, 11(1), pp. 88-94.
- Astuti, R. S., Warsono, H. & Rachim, A., 2020. *Collaborative Governance dalam Perspektif Administrasi Publik*. Semarang: Universitas Diponegoro Press.
- Candranegara, I. M. W., Mirta, I. W. & Suryana, I. N. M., 2019. Government Collaboration of Pentahelix Models in the Management of Ecotourism D'bungungan View Telaga Tunjung (Case Study Management of Ecotourism D'Bundungan View Telaga Tunjung in Timpag Village, Tabanan Bali). *Journal IAPA*, 1(1).
- Databoks.(2021).Prevalensi Stunting Balita Indonesia Tertinggi ke-2 di Asia Tenggara. <https://databoks.katadata.co.id/data-publish/2021/11/25/prevalensi-stunting-balita-indonesia-tertinggi-ke-2-di-asia-tenggara>
- Duadji, N., Tresiana, N., & Faedlulloh, D. (2019). *Ilmu Administrasi Publik*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Ipan, Priyanti, E. & Purnamasari, H., 2021. Collaborative governance dalam penanganan stunting. *Journal KINERJA*, 18(3), pp. 383-391.
- Kurniasih, Y. & Suwitri, S. H. S., 2023. Collaborative Governance Dalam Percepatan Pencegahan Stunting di Kabupaten Temanggung. *Journal of Public Administration and Local Governance*, 7(1), pp. 68-76.
- Laily, L. A. & Indarjo, S., 2023. Literatur Riview : Dampak Stunting terhadap Pertumbuhan dan Perkembangan Anak. *Higeia Journal of Public Health Research and Development*, 7(3), pp. 354-364.
- Nisa, L. S., 2018. Kebijakan Penanggulangan Stunting di Indonesia. *Jurnal Kebijakan Pembangunan*, 13(2), pp. 173 - 179.
- Prendergast, A.J., & Humprey, J.H. (2014). The Stunting Syndrome in Developing Countries. *Paediatrics and International Child Health*. 34(4), 250-265.
- Rahayu, A. Y. S. & Ramadhanty, T. F., 2023. Dinamika Kolaborasi dalam Tata Kelola Layanan Terpadu Satu

- Atap untuk Pekerja Migran Kabupaten Cirebon Jawa Barat. *Open Journal Systems*, 17(11), pp. 2789-2796.
- Ran, B. & Qi, H., 2018. Contingencies of Power Sharing in Collaborative Governance. *Sage Journals*, 48(8).
- Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023
- RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2024
- RPJMD Provinsi Jawa Tengah 2018-2023
- Saufi, A., 2021. Dinamika Collaborative Governance dalam Penanggulangan Stunting di Tengah Pandemi Covid-19. *Prosiding Seminar Nasional Penggulangan Kemiskinan*, 1(1), pp. 80-95.
- Sugiyono. (2015). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung : Alfabeta
- TP2S. (2020). Strategi Nasional Percepatan Pencegahan Anak Kerdil (Stunting). <https://stunting.go.id/stranas-p2k/>
- Yunifar, A. T., Kusbandrijo, B. & Puspaningtyas, A., 2022. COLLABORATIVE GOVERNANCE PADA PENERAPAN PERWALI NO 79 TAHUN 2022 TENTANG PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING DI KOTA SURABAYA. *Jurnal Penelitian Administrasi Publik*, 2(04), p. 148-158.